

# Menara TEBUIRENG

Jurnal Ilmu - Ilmu Keislaman

PENYELESAIAN DELIK AGAMA SECARA  
PARTISIPATORIS

*Imron Rosyadi*

OTENTISITAS ḤADĪTH ĀḤĀD

*Amir Jamiluddin*

NILAI KEBENARAN PESAN DAKWAH

*Moh. Ali Aziz*

PENDIDIKAN ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

*Khoirun Niam*

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM  
IMPLEMENTASI *TOTAL QUALITY MANAGEMENT*

*Mardiyah*

PENDIDIKAN MORAL PERSPEKTIF HAMKA DAN  
RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN MODERN

*Mukani*



Diterbitkan oleh Lembaga Pusat Pengkajian, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat (LP4M) Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) Tebuireng Jombang.



Terbit dua kali setahun, bulan Maret dan September, berisi tulisan ilmiah tentang ilmu pendidikan dalam bentuk: (1) hasil penelitian, (2) gagasan konseptual, (3) kajian kepustakaan, dan (4) pengalaman praktis.

**Pelindung/Penasehat:**

KH. Salahudin Wahid

**Pembina**

H. Haris Supratno

HM. Mukhsin Kasmin

**Penanggungjawab**

Sokhi Huda

Penyunting

Dimiyati (Ketua)

Asy'ariy (wakil Ketua)

Bambang Subandi (anggota)

Jasminto (anggota)

Masrukhin (anggota)

**Penyunting Ahli:**

H. Imam Bawani

H. Sunarto

H. Imron Arifin

H. Malichah Tawaf

H.M. Nur Kholis Setiawan

H.M. Yunus Abu Bakar

**Pelaksana Tata Usaha:**

Anis Wahid

Robi'ah Mahtumah

Muhammad

M. Nafi

Moh. Nizar Affarn

Ramlan

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Jl. Irian Jaya 55, Tebuireng Jombang Telp/Fax: (0321) 874685, fax. Fax.(0321) 874668, e-mail: jurnalmenaratebuireng@gmail.com

Rektor: KH. Salahuddin Wahid, Pembantu Rektor I: H. Haris Supratno, Pembantu Rektor II: HM. Mukhsin Kasmin, Direktur Pascasarjana: H. Imron Arifin. Dekan Fakultas Syariah: HA. Faruq Zawawi, Dekan Fakultas Tarbiyah: H. Choirul Anwar, Fakultas Da'wah: H. Amir Jamiludin.

Penyunting menerima tulisan yang belum diterbitkan dalam media cetak. Ketentuan tulisan dapat dilihat pada sampul belakang. Penyunting dapat memberikan saran-saran perubahan pada tulisan yang akan dimuat untuk konsistensi format tanpa mengubah substansi tulisan.



## DAFTAR ISI

Redaksi .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Pedoman Transliterasi .....	iv
<b>PENYELESAIAN DELIK AGAMA SECARA PARTISIPATORIS</b>	
<i>Imron Rosyadi</i> .....	105
<b>OTENTISITAS HADĪTH ĀḤĀD</b>	
<i>Amir Jamiluddin</i> .....	125
<b>NILAI KEBENARAN PESAN DAKWAH</b>	
<i>Moh. Ali Aziz</i> .....	139
<b>PENDIDIKAN ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL</b>	
<i>Khoirun Niam</i> .....	160
<b>KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT</b>	
<i>Mardiyah</i> .....	174
<b>PENDIDIKAN MORAL PERSPEKTIF HAMKA DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN MODERN</b>	
<i>Mukani</i> .....	196

# PENDIDIKAN ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Oleh

**Khoirun Niam\***

Abstract: The change, because it is a necessity, to be faced with the responsibility of readiness educational institutions. Changes in educational institutions located at the level of the contents, substance, and location. These changes pose a challenge to the Islamic educational institutions: between maintaining traditions or adopt new things opposed; between the interests of the capitalist-industrialist or agricultural; between inheritance of fundamental Islamic values or Islamic values plural; until the option concerned with worldly or hereafter. History proves, that every nation has its own educational goals. Ancient Egypt and Ancient India oriented to the service to the gods, the ancient Chinese nobility of character-oriented, Europe intends to form a state defense troops, and Indonesia to meet the needs of employees and labor required.

*Keywords: Social Change, Islamic Education, History of Education*

---

\* Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan serta Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Universitas Sunan Giri Surabaya

## A. PENDAHULUAN

Perubahan sosial melalui jalur pendidikan telah memasuki wilayah aksi nyata, di samping tetap menjadi adagium penting di kalangan filosof. Apa yang tampak di lingkungan membuktikan betapa pendidikan mempunyai kontribusi cukup penting dalam proses perubahan. Contoh klasik yang dapat disebut adalah peran Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan seorang ulama, Haji Mas Mansur, dalam mempersiapkan dan menentukan pilihan Indonesia merdeka. Dalam perjalanan sejarah, mereka mengawal, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.<sup>1</sup> Tokoh-tokoh ini adalah kalangan terdidik pada masanya yang berusaha memerankan diri dalam proses-proses perubahan yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dr. Wahidin Soediro Husodo adalah tokoh lain yang datang sebelum Soekarno-Hatta. Melalui peran yang ditampilkannya –dengan didirikannya Budi Utomo (20 Mei 1908)- Indonesia menandai adanya masa kebangkitan.

*Para filosof tidak kalah pentingnya dipandang sebagai pembawa perubahan di dunia. Pandangan ini diungkapkan oleh Karl Marx: “Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern“ (dalam memandang dunia, para filosof hanya berbeda dalam melakukan interpretasi, namun tergantung pada merekalah perubahan dunia ini). Adagium itu diabadikan sebagai prasasti yang terpampang besar di pintu masuk salah satu gedung tua (alte Gebeude) Humboldt Universität Berlin di jalan Unter den Linden. Di tempat ini, Karl Marx pernah menjadi mahasiswa dan mengajar. Maksud dikemukakannya adagium itu adalah agar orang-orang yang terlibat dalam pendidikan mempunyai semangat dan kesadaran untuk selalu melakukan perubahan penting di dunia, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka.<sup>2</sup>*

Perubahan bisa dilakukan dengan cara revolusi (secara pelan dan sistematis) maupun evolusi (secara cepat dan radikal). Namun, apa yang terpampang di pintu gerbang Melbourne University menunjukkan bahwa perguruan tinggi ini memproklamirkan diri sebagai lembaga perubahan yang memilih jalur evolusi. Adagium “*The Evolution Starts Here*” sebagaimana pada gambar di bawah diharapkan mampu memberikan citra dan semangat perubahan melalui jalur pendidikan.

<sup>1</sup> Soekito dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir, (eds.). *Cendekiawan dan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1984), xvi.

<sup>2</sup> (Noer, 1996: 84-85).

Tulisan ini akan diawali dengan pemaparan konteks sosio-historis orientasi pendidikan untuk dapat memetakan perubahan orientasi pendidikan yang terekam dalam lintasan sejarah berbagai bangsa. Setelah itu, studi dilanjutkan dengan keterkaitan antara perubahan sosial dengan lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran letak lembaga pendidikan dalam suatu proses perubahan. Refleksi dialektis untuk menilai dan menganalisa tantangan lembaga pendidikan Islam di era yang berubah diperlukan untuk mendapatkan pandangan inti dari kajian ini. Di bagian akhir, ada beberapa pandangan dan tawaran berkaitan dengan solusi permasalahan pendidikan Islam masa depan.

## **B. KONTEKS SOSIO-HISTORIS ORIENTASI PENDIDIKAN**

Dalam perspektif historis, orientasi dan tujuan pendidikan itu berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Masing-masing masa mempunyai ciri khas dan orientasi yang berbeda sesuai dengan kondisi perkembangan dan tantangan zamannya. Pada zaman Mesir purba yang telah mengenal peradaban tinggi, tujuan pendidikannya diorientasikan pada nilai kesusilaan dan keagamaan yang bermuara pada i'tikad untuk berbakti pada dewa-dewa.<sup>3</sup> Namun, yang menyelenggarakan pendidikan bukanlah negara dan masyarakat luas seperti sekarang ini, tetapi para pendeta. Hanya prajurit dan pendetalah yang bisa menikmati pendidikan.

Di India pada masa kuno, terdapat kemiripan dengan Mesir dari sisi menomorsatukan pengajaran agama dan penyelenggara pendidikannya, yaitu mereka yang menduduki kasta tertinggi (Brahmana). Kasta yang terendah tidak mendapatkan pendidikan, hanya tiga kasta pertama yang mendapatkan pendidikan, yaitu Brahmana, Ksatria dan Waisya.<sup>4</sup> Di sini, terdapat perbedaan yang jelas: siapa yang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak diperuntukkan bagi semua orang dan diarahkan pada kepentingan pembinaan keagamaan. Perubahan orientasi terjadi di India ketika Rabindranath Tagore (1861–1941) melakukan usaha-usaha perubahan pendidikan untuk mewujudkan persaudaraan sedunia dengan tanpa mengenal perbedaan kasta, warna kulit, bangsa, dan agama.

<sup>3</sup> I. Djumhur dan H. Danasaputra, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: t.t.), 4.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 5.

Lain halnya dengan apa yang terjadi di Cina pada zaman purba. Masalah-masalah pendidikan tidak dihubungkan dengan agama, tetapi tradisi dan kehidupan praktis. Bukan kuil atau institusi keagamaan yang diutamakan, melainkan negara. Bukan pendeta yang dihormati, melainkan leluhurnya. Sejak 2200 sebelum Masehi, negara (kerajaan) dan keluarga telah menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan mereka ditujukan untuk mendidik kepala-kepala keluarga yang baik, suami yang setia, anak yang patuh, pegawai-pegawai yang rajin, warga negara yang jujur dan rela berbakti, raja-raja yang arif-bijaksana, dan tentara yang gagah berani. Dengan begitu, pendidikan mereka diarahkan pada kepentingan praktis dan pragmatis. Sampai sekarang pun dampaknya masih bisa dilihat, terbukti banyak orang Cina yang tidak menempatkan agama sebagai unsur penting dalam pendidikan. Ketika studi di Jerman (1997-2003), penulis sering bertukar pikiran dengan beberapa mahasiswa dari Cina. Pendapat mereka menunjukkan penolakan akan perlunya agama dalam kehidupan ini.

Di dataran Eropa, khususnya Yunani pada zaman purba ( $\pm$  tahun 900 SM) yang pusat kebudayaannya ada di kota Sparta, pendidikan ditujukan untuk membentuk serdadu-serdadu pembela negara.<sup>5</sup> Anak adalah milik negara dan pendidikan diselenggarakan oleh negara. Hanya warga negaranya saja yang berhak mendapatkan pendidikan. Anak-anak yang sudah berumur tujuh tahun dimasukkan ke dalam asrama negara. Apa yang terjadi di Romawi, pada awalnya, tujuan pendidikannya sama dengan di Yunani, terutama ketika Romawi berusaha memperluas wilayahnya. Pendidikan ditujukan untuk membentuk manusia yang selalu siap berkorban membela kepentingan tanah airnya dan diutamakan untuk membentuk warga negara yang cakap sebagai tentara. Baru setelah filsafat Epicurisme yang dikembangkan oleh Epicuros (341-270 SM) dan filsafat Stoa yang dikembangkan oleh Zeno (336-264 SM), orientasi pendidikannya berubah dari yang mengedepankan nilai-nilai kepahlawanan ke nilai kemanusiaan.

Munculnya Kristen di dataran Eropa memberikan warna baru. Kebudayaan Yunani-Romawi berangsur-angsur mendapatkan pola baru dan cap kebudayaan Nasrani. Orientasi pendidikan yang diarahkan pada nilai-nilai agama mendapatkan momentum kembali. Pandangan pentingnya adalah bahwa tujuan hidup manusia tidak terletak di dunia

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 24.

fana ini (*diesseitig*), tetapi alam baka kelak (*jenseitig*). Agama, khususnya Kristen Katholik, menjadi pusat segala pengajaran dan pengetahuan. Sampai datangnya zaman Renaissance ( $\pm 1450-1600$ ), yaitu kelahiran kembali kebudayaan klasik. Orang-orang berorientasi kembali ke bahasa Latin dan Yunani serta filsafatnya.<sup>6</sup> Dengan cara itu, diharapkan orang bisa terlepas dari ikatan abad pertengahan yang mementingkan sisi *Jenseitigkeit* dari pada *Diesseitigkeit*. Cita-cita untuk menjadi pendeta ditinggalkan dan cita-cita manusia diarahkan ke masa jayanya Republik Romawi yang mendorongnya mempelajari pelbagai pengetahuan. Aliran humanisme lebih mendominasi daripada paham yang menempatkan pentingnya agama. Ukuran kebenaran dan keindahan dicari dan didapatkan pada manusia. Tuhan sebagai pusat norma tertinggi ditinggalkan.

Zaman Renaissance yang mengedepankan sisi humanisme ini akhirnya ditindaklanjuti oleh aliran Realisme pada tahun 1600. Aliran baru ini mengarahkan perhatian pada dunia nyata: kepada alam dan benda-benda sebenarnya yang memunculkan ilmu-ilmu kealaman. Pendidikan berorientasikan kepada nilai keagamaan semakin dipinggirkan dengan munculnya gerakan pencerahan (*Aufklärung*) pada abad ke 18. Pada abad ini manusia ingin bebas dari ikatan gereja, tradisi, dan dari absolutisme negara. Manusia percaya pada akal budinya. Karena itu, abad ini disebut juga dengan abad rasionalisme. Negara dituntut untuk menyelenggarakan pengajaran yang lepas sama sekali dari pengaruh gereja. Gerakan yang akhirnya memunculkan paham sekularisme memisahkan antara urusan agama dan bukan agama.

Di Indonesia, pada zaman penjajahan, pendidikan ditujukan untuk kepentingan praktis pragmatis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang diperlukan oleh pihak penjajah.<sup>7</sup> Pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan religius dilakukan secara tidak resmi dalam bentuk kursus-kursus ataupun dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintahan Belanda. Namun begitu, ada pula sekolah-sekolah agama yang mendapatkan subsidi Belanda, tetapi lebih banyak diorientasikan pada sekolah-sekolah Kristen sebagai usaha mengkristenkan kaum pribumi. Di antara sekolah agama yang mendapatkan subsidi dari

<sup>6</sup> Ruggiero Romano dan Alberto Tenenti (ed.), *Welt Geschichte, Die Grundlegung der modernen Welt, Spätmittelalter, Renaissance, Reformation* (Ausburg, 2000)/

<sup>7</sup> J.S. Furnivall, *Netherlands India*. (Cambridge at the University Press, 1975); Furnivall, *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India* (New York University Press, 1956).



Belanda adalah sekolah di bawah naungan Muhammadiyah. Pada tahun 1915, pemerintah kolonial Belanda memberikan subsidi, karena sekolah Muhammadiyah dianggap memenuhi persyaratan Belanda.<sup>8</sup>

Pada mulanya penjajah Belanda hanya memberikan kesempatan pendidikan kepada para putra bangsawan dan orang kaya saja, namun, setelah adanya politik balas budi (politik etik), pendidikan yang berorientasi ke rakyat kecil juga dilakukan. Setelah Indonesia merdeka, diusahakan penyeimbangan antara pendidikan yang berorientasi religius dan pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan kekinian.<sup>9</sup> Akan tetapi, masih juga terdapat tarik menarik kepentingan keduanya yang mengakibatkan ada kegagalan dalam menentukan orientasi.

Dari kilasan sejarah di atas, jelas terlihat betapa orientasi dan tujuan pendidikan itu senantiasa berubah dan silih berganti: dari yang mementingkan nilai-nilai keagamaan (*religious values*) kepada kepentingan praktis pragmatis, nilai humanis, rasionalis, realistik, dan sekularis. Perubahan ini seiring dengan tantangan dan perkembangan zamannya; atau dengan kata lain, seiring dengan konteks sosio-historisnya.

### C. LETAK LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan sosial (*social change*), menurut Giddens, adalah ungkapan sosiologis yang sulit untuk didefinisikan. Segala hal akan mengalami perubahan pada setiap saat sesuai dengan kadar dan ukurannya. Kutipan berikut menguatkan paparan tersebut.

*“Social change is difficult to define, because there is a sense in which everything changes, all of the time. Every day is a new day; every moment is a new instant in time. The Greek philosopher Heraclitus pointed out that a person cannot step into the same river twice. On the second occasion, the river is different, since water has flowed along it and the person has changed in subtle ways too”.*<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Rinkes dalam Robert van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite* (The Hague and Bandung, 1960), 166; Shafiuddin dalam M. Rusli Karim (ed.), *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentari* (Jakarta: Rajawali, 1986), 335; S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

<sup>9</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: 2007); Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1999); Samsul Nizar (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: 2007); Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004); Suwito dan Fauzan (eds.), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005); Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>10</sup> Anthony Giddens, *Sociology* (Cambridge: Polity Press, 2006), 43-46.

Secara esensial, pernyataan pada kutipan di atas dapat dibenarkan. Namun, dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya orang yang menyeberangi sungai dua kali, seperti digambarkan filosof Yunani Heraclitus, adalah “orang” dan “sungai” yang sama; yang diseberangi pada dua kesempatan berbeda. Terdapat hal-hal yang sama secara kualitatif pada diri orang yang menyeberangi sungai itu. Misalnya, kenyataan bahwa orang tersebut akan basah kakinya ketika menyeberang dalam dua kesempatan berbeda. Yang berbeda adalah tingkat atau kuantitas air yang membasahi kaki orang yang menyeberang. Dengan demikian, terdapat sisi perubahan secara kuantitatif berupa peningkatan atau increase (*auxēsis*) dan penurunan atau decrease (*phthisis*).<sup>11</sup>

Kuantitas perubahan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Aristoteles ketika menjelaskan cakupan perubahan. Ia berpendapat bahwa perubahan itu mencakup empat hal:

*“Change (metabolē) is either (1) of substance, viz. coming to be (genesis) and ceasing to be (phthora); or (2) of quality, viz. alteration (alloiōsis); or (3) of quantity, viz. increase (auxēsis) and decrease (phthisis); or (4) of place, viz. locomotion (phora).”*<sup>12</sup>

Perubahan itu mencakup substansi isi, kualitas, kuantitas, dan lokasi atau tempat dari suatu hal. Dalam hal substansi, perubahan dapat mengarah pada “menjadi sesuatu” atau justru “menjadi tiada”. Sedangkan perubahan dalam hal kualitas dapat berupa pengembangan. Perubahan secara kuantitas dapat mengarah pada peningkatan, atau bahkan penurunan. Perubahan juga dapat berkaitan dengan lokasi atau posisi suatu hal.

Pertanyaan yang perlu diajukan dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan adalah di posisi manakah lembaga pendidikan akan berubah? Apakah pada sisi substansi, kualitas, kuantitas atau bahkan pada sisi gerak dan langkah lembaga ke tingkat dan suasana berbeda? Lebih konkritnya, pertanyaan dapat dikemukakan: mampukah lembaga pendidikan menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat? Apakah lembaga pendidikan satu-satunya institusi yang dapat mengantarkan anak ke arah kedewasaan dan kemandirian? Apakah sekolah justru berperan sebagai lembaga pewarisan nilai, ideologi dan arah politik tertentu yang kebebasan dan ruang publiknya semakin sempit?

<sup>11</sup> J.A.K. Thomson, *Aristotle Ethics* (London: Penguin Book, 1976), 355.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 355.

Mampukah lembaga pendidikan menjadi tempat tumbuh kembangnya pengetahuan dan teknologi; atau justru sebagai lembaga penghambat kemajuan karena pilihan pada posisi mempertahankan kualitas dan kuantitas tradisional? Mampukah sekolah menjadi jembatan untuk menuju kemakmuran penduduk; atau sebaliknya, justru menciptakan pengangguran terdidik, karena bidang keilmuan dan profesionalitasnya tidak sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, sehingga berujung pada pemiskinan umat? Pertanyaan-pertanyaan di atas, kalau ditelusuri akar cakupan perubahan sebagaimana pendapat Aristoteles, akan dapat menunjukkan letak lembaga pendidikan di tengah perubahan.

Permasalahan berkaitan dengan eksistensi lembaga pendidikan di masyarakat, misalnya, ternyata di kalangan masyarakat sendiri terdapat pertanyaan bernada skeptis akan eksistensi dan peran yang ditampilkan dalam mendidik anak, di samping pengakuan akan peran strategis sekolah yang diwujudkan dengan adanya ketaatan memasukkan anak ke berbagai lembaga pendidikan. Salah satu contoh pandangan skeptis adalah apa yang dipertanyakan Torsten Husén dalam bukunya *The School in Question* (1976). Buku yang membidik permasalahan kaitan antara sekolah dengan masyarakat Barat ini di antaranya mempertanyakan, “*has the school the right to educate?*” Husén<sup>13</sup> merangkum pendapat skeptis Carl Bereiter (1973) dalam bukunya *Must We Educate?* sebagai berikut:

“He doest not question the necessity of having an institution that provides basic skill and knowledge. He does question, however, the right of the school to ‘educate’, to impose on all children the prevailing the mode of behavior and valuation. Such claims are not compatible with the ethos of free, pluralistic society. The salient feature of the school in modern society is the prerogative of the state to provide an education which leaves no room for young people to try out their own ways and to learn from their own mistakes”.

Yang dipertanyakan Bereiter adalah hak istimewa sekolah untuk menanamkan nilai dan prilaku tertentu pada semua anak. Hal ini, menurut Bereiter, tidak sesuai dengan semangat kebebasan dan kondisi masyarakat plural. Negara memang mempunyai hak prerogratif atas tersedianya pendidikan. Namun, yang perlu ditekankan dalam pandangan Bereiter adalah kesempatan bagi anak didik untuk berlatih sesuai dengan cara yang mereka pilih dan untuk belajar dari kesalahan sendiri.

<sup>13</sup> Torsten Husén, *The School in Question* (New York, 1979), 34.

Apa yang tertuang dalam pandangan Bereiter di atas mewakili mereka yang ingin mempertanyakan peran lembaga pendidikan dalam masyarakat. Berbeda dengan ini, Bowles dan Gintis (1976) memandang pentingnya lembaga pendidikan khususnya di masyarakat yang telah digempur dengan kepentingan dan suasana kapitalis.

“The formal system of schooling, according to the correspondence principle, is set up in order to reproduce the existing social and economic order. The schools are organized in the same way as modern corporations with the purpose of ‘educating’ young people to become disciplined and docile workers. The school, then, exist to prepare young people for their future roles in the capitalist economy. They are sorting and sifting institutions which distribute status. The ‘technocratic-meritocratic’ ideology of equal educational opportunity serves as a kind of opium for the people”.<sup>14</sup>

Gagasan di atas mewakili ilmuwan kelompok Neo-Marxist<sup>15</sup> yang memandang bahwa lembaga pendidikan mempunyai peran untuk mendidik anak menjadi pekerja handal dan disiplin. Hal ini sejalan dengan ciri masyarakat kapitalis modern. Perusahaan-perusahaan juga mempunyai kepentingan untuk itu. Dengan demikian, keberadaan sekolah dibutuhkan dalam rangka untuk mempersiapkan peran mereka di tengah masyarakat yang berciri ekonomi kapitalis.

Pendidikan akan mengarahkan anak didik ke berbagai status sosial yang berbeda. Pandangan akan pentingnya kesamaan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan dianggap hanya sebagai *opium for the people*. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, bukan kesamaan mendapatkan pendidikan yang menjadi masalah, tetapi perbedaan keterampilan anak didik yang dapat diserap oleh kepentingan pasar pada akhirnya nanti. Dalam hal ini, lembaga pendidikan harus dapat menempatkan diri pada posisi pemberian bekal anak didik, sehingga ia mampu terserap dalam konteks kehidupan sosial ekonomi yang akan berubah.

Perubahan pada tataran isi, substansi, dan lokasi lembaga pendidikan memang akan berimplikasi pada banyak hal. Tentunya lembaga pendidikan harus dapat merespon dan menempatkan diri pada posisi yang tepat. Banyak tantangan sosial yang dihadapi lembaga pendidikan. Tidak saja pada peran dan eksistensinya di tengah masyarakat, tetapi juga kaitannya dengan politik, ideologi dan tata nilai, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industrialisasi, masalah kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 28.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 27-28.

Dari sisi lokasi, apa yang dihadapi oleh negara maju akan berbeda masalahnya dengan apa yang menjadi tantangan negara berkembang.<sup>16</sup> Apa yang selalu hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat agamis akan berbeda tantangan dan nuansa perubahan yang akan dihadapi lembaga pendidikannya dibanding masyarakat sekuler. Mayoritas negara yang penduduk muslimnya minoritas tentu akan mempunyai tantangan berbeda yang dihadapi dunia pendidikan. Oleh karena itu, idealnya lembaga pendidikan harus mampu menembus sekat kepentingan lokal. Selain itu, ia seraya menawarkan kondisi yang memungkinkan anak didik mampu survive pada konteks waktu dan tempat ia akan hidup. Namun, tuntutan ideal ini akan sulit diwujudkan manakala gerakan perubahan yang terjadi berada pada dua kutub berbeda.

Apabila perubahan memunculkan adanya kontradiksi, antara yang semestinya dipertahankan dan yang semestinya berubah, antara nilai tradisional dengan nilai yang baru, maka penyelesaian pragmatis dari kondisi seperti ini adalah lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan konteks sosial tempat ia berada. Dengan demikian, keluarannya akan secara fungsional dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi kehidupannya.

#### **D. TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA YANG BERUBAH**

Kalau gambaran tantangan lembaga pendidikan akan bervariasi di era yang berubah ini, sebagaimana paparan di atas, maka pendidikan Islampun akan menghadapi hal yang sama. Dilihat lebih dekat, di negara-negara berpenduduk muslim, baik muslim sebagai mayoritas ataupun minoritas, tantangan-tantangan itu terbentang: mulai dari bernuansa pilihan dilematis antara berorientasi ke “Mekkah” atau ke “London”; antara mempertahankan tradisi atau mengadopsi hal baru yang berlawanan dengan tradisi; antara kepentingan kapitalis-industrialis atau agraris; antara pewarisan nilai Islam fundamental atau nilai Islam plural; sampai pada mementingkan pilihan duniawi atau ukhrawi.

Apa yang terjadi di Turki, misalnya, letak geografis yang dekat dengan Eropa dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat

---

<sup>16</sup> Peter J. Opitz, *Die Dritte Welt in der Krise: Grundprobleme der Entwicklungsländer* (München: C.H. Beck, 1984).

ini menghadapkan pada pilihan dilematis: antara berorientasi pada arah kultural Eropa atau kepentingan preservasi nilai dan tradisi Islam Mekkah. Dahulu telah dibuktikan oleh sejarah bahwa Turki telah mempunyai kekuatan, kekuasaan, dan peradaban besar dengan mengedepankan nilai dan peradaban Islam.

Bassam Tibi, Ilmuwan politik Jerman yang dilahirkan di Damaskus tahun 1944, mengulas begitu detail masalah di atas dalam bukunya *Aufbruch am Bosphorus: Die Türkei zwischen Europa und dem Islamismus* (1998). Inti buku ini menggambarkan kondisi Turki saat ini yang berada di bawah bayang-bayang kebesaran warisan Islam saat Turki Usmani jaya dan pengaruh kemajuan masyarakat ekonomi Eropa. Ketika pilihan dijatuhkan pada arah sekularisasi dan westernisasi, sebagai reaksi atas dominasi Eropa, maka tentu mempunyai implikasi pada redupnya bayang-bayang kemajuan zaman Turki Usmani. Oleh karena itu, perubahan orientasi politis kultural ini akan banyak mempengaruhi corak dan sistem pendidikan Islam yang akan diterapkan.

Dilema dalam menentukan pilihan corak pendidikan Islam bagi masyarakat Turki lebih tampak lagi ketika kenyataan menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang bermigrasi ke berbagai negara maju di Eropa. Keberadaan mereka di tengah mayoritas Kristen Eropa mengharuskan untuk berhadapan dengan kultur berbeda, tuntutan ekonomi yang jelas, serta kondisi masyarakat yang lebih heterogen dan plural. Tradisi dan nilai Islam menjadi taruhan bagi mereka: haruskah nilai dan tradisi Islam diwariskan pada generasi penerus di tengah mayoritas masyarakat Barat yang Kristen? Ataukah mereka bebaskan generasi penerusnya berintegrasi dengan budaya dan kultur Eropa?

Pilihan melanjutkan tradisi Islam, nampaknya dilembagakan dalam bentuk pendidikan Islam formal dan informal. Pada wilayah formal inilah tantangan konkrit muncul. Fasilitas yang akan dibangun, seperti berupa masjid atau sekolah, ternyata tidak begitu mudah untuk mendapatkan izin. Padahal, banyak kalangan yang akhirnya berhasil mendapatkan izin.

Tantangan lain adalah haruskan pendidikan Islam terintegrasi dengan sistem pendidikan formal yang telah ada? Di berbagai negara bagian di Jerman, kebanyakan integrasi pendidikan (agama) Islam di sekolah formal banyak mengalami kendala. Mereka lebih memilih untuk mengajarkan etika dari pada pelajaran agama. Namun begitu, ada

beberapa negara bagian yang mengizinkan. Pertimbangannya adalah banyaknya jumlah anak yang menghendaki diberikannya pelajaran agama Islam di sekolah.

Ketika ijin didapat, tantangan masih ada, yakni berupa materi apa yang boleh diajarkan dalam mata pelajaran agama Islam, terutama setelah peristiwa teror terhadap Barat dan Muslim dituduh berada dibalik serangan teror 11 September 2001. Mereka khawatir kalau ajaran tentang jihad disebarluskan melalui pendidikan. Permasalahan teknis lain juga muncul terkait siapa guru yang harus mengajar dan siapa pula yang akan memberi gaji. Masalah ini terus saja bergulir, sekaligus menjadi tantangan bagi komunitas minoritas muslim di tengah mayoritas non muslim.

Tantangan di kebanyakan dunia muslim, termasuk Indonesia, berada pada seputar antara mempertahankan tradisi atau mengadopsi hal baru yang berlawanan; antara kepentingan kapitalis-industrialis atau agraris; antara pewarisan nilai Islam fundamental atau nilai Islam plural; sampai pada mementingkan pilihan duniawi atau ukhrawi.

## **E. PENUTUP**

Perubahan, karena merupakan keniscayaan, harus dihadapi dengan kesiapan. Mempersiapkan anak didik di dunia yang dinamis merupakan tanggungjawab lembaga pendidikan. Hal ini memerlukan usaha serius dan konsisten untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dengan keseriusan dan kemauan untuk memulai, diharapkan justru pendidikan yang akan memberikan arah perubahan, bukan perubahan sosial yang mendikte pendidikan untuk melakukan penyesuaian.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Baacke, Dieter. *Einführung in die Außenschulische Pädagogik*. München: Juventa Paperback, 1976.
- Brandt, Sigrid. *Religiöses Handeln in moderner Welt*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993.
- Craig, Edward (ed.). dalam Habermas. *Routledge Encyclopedia of Philosophy*: London and New York: Routledge, t.t.

- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: 2007.
- Djumhur, I dan H. Danasaputra. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: t.t.
- Furnivall, J.S. *Netherlands India*. Cambridge at the University Press, 1975.
- \_\_\_\_\_. *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*. New York University Press, 1956.
- Giddens, Anthony. *Sociology*. Cambridge: Polity Press, 2006.
- Habermas, Jürgen. *Strukturwandel der Öffentlichkeit*. Neuwied am Rhein und Berlin: Luchterhand, 1968.
- Hafez, Kai (ed.). *Der Islam und der Westen*. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1997.
- Husén, Torsten. *The School in Question*. New York, 1979.
- Kahin, George McTurnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1970.
- Karim, M. Rusli (ed.). *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Küng, Hans dan Karl-Josef Kuschel (eds.). *Wissenschaft und Weltethos*. München Zürich: Piper, 1998.
- Mahasin, Aswab dan Ismed Natsir (eds.). *Cendekiawan dan Politik*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos, 1999.
- Nasution, S. *Sejarah Pendidikan Indonesia* Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Niel, Robert van. *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. The Hague and Bandung, 1960.
- Nizar, Samsul (ed.). *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: 2007.
- Opitz, Peter J. *Die Dritte Welt in der Krise: Grundprobleme der Entwicklungsländer*. München: C.H. Beck, 1984.
- Poeradisatra, S.I. *Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Peradaban Modern*. Jakarta: P3M, 1986.
- Rinkes, D. *Bescheiden betreffende de Vereeniging Sarekat Islam*. Zeer Geheime Missive van den Adviseur voof Inlandsche Zaken aan



- den Gouverneur-General, dalam Robert van Niel. *The Emergence of the Indonesian Modern Elite*. The Hague and Bandung, 1960.
- Romano, Ruggiero dan Alberto Tenenti (ed.). *Welt Geschichte, Die Grundlegung der modernen Welt, Spätmittelalter, Renaissance, Reformation*. Augsburg, 2000.
- Sünker, Heinz, Dieter Timmermann, Fritz-Ulrich Kolbe (eds.). *Bildung, Gesellschaft, soziale Ungleichheit*. Frankfurt am Main, 1994.
- Suwendi. *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Suwito dan Fauzan (eds.). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Thomson, J.A.K. *Aristotle Ethics*. London: Penguin Book, 1976.
- Tibi, Bassam. *Aufbruch am Bosphorus: Die Türkei zwischen Europa und dem Islamismus*: München Zürich: Diana Verlag, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Der Islam und das Problem des kulturellen Bewältigung sozialen Wandels*. Frankfurt am Main: Suherkamp Verlag, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Die Krise des modernen Islams*. Frankfurt am Main: Suherkamp Verlag, 1991.
- Wijaya, Irianto Saputra. *Pendidikan Harus Berorientasi pada Kehidupan Umat Manusia*. Pelita, 17, September 1990.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Zuhairini dkk.. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.